

Dampak Lepasnya Timor Timur Terhadap Kestabilan Indonesia 1999 - 2020

Zulfikar Aziz Rasyid¹, Fito Humam Hariri²

^{1,2}Universitas Jambi

*Corresponding author, e-mail: zulfikar.aziz.r@gmail.com

Abstrak

Peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia modern. Artikel ini menganalisis dampak peristiwa tersebut terhadap kestabilan Indonesia pada periode 1999–2020 dengan meninjau empat dimensi utama: politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya menimbulkan guncangan politik, konflik militer, serta krisis kemanusiaan, dalam jangka panjang peristiwa tersebut justru menjadi katalis bagi reformasi demokrasi, restrukturisasi militer, desentralisasi kekuasaan, dan pemulihan citra Indonesia di mata internasional. Dampak ekonomi juga terlihat dari berkurangnya beban fiskal dan meningkatnya kepercayaan investor, sementara secara sosial budaya peristiwa ini mendorong refleksi mendalam mengenai nasionalisme, HAM, serta pendekatan damai dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, lepasnya Timor Timur bukan sekadar kehilangan wilayah, tetapi juga momentum transformatif bagi konsolidasi demokrasi dan penguatan stabilitas nasional Indonesia.

Kata Kunci: Keamanan nasional; Otonomi daerah; Reformasi demokrasi; Timor Leste,.

Abstract

The 1999 secession of East Timor from Indonesia marked a significant turning point in modern Indonesian political history. This article analyzes the event's impact on Indonesian stability from 1999 to 2020, examining four key dimensions: political, security, economic, and social. Using historical research methods including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study demonstrates that, despite initially causing political upheaval, military conflict, and a humanitarian crisis, the long-term event served as a catalyst for democratic reform, military restructuring, decentralization of power, and the restoration of Indonesia's international image. The economic impact was also evident in the reduced fiscal burden and increased investor confidence, while socio-culturally, the event prompted in-depth reflection on nationalism, human rights, and peaceful approaches to conflict resolution. Thus, the secession of East Timor was not merely a loss of territory but also a transformative momentum for the consolidation of democracy and the strengthening of Indonesia's national stability.

Keywords: Democratic reform; National security; Regional otonomy; Timor Leste.

How to Cite: Rasyid, Z. A. & Hariri, F. H. (2026). Dampak Lepasnya Timor Timur Terhadap Kestabilan Indonesia 1999 - 2020. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(3), 124-133.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©20256 by author.

Pendahuluan

Peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 merupakan momen bersejarah yang tidak hanya mengubah peta geopolitik regional, tetapi juga menjadi ujian besar bagi stabilitas nasional Indonesia. Dalam kondisi transisi demokrasi yang masih rapuh pasca-kejatuhan Orde Baru, Indonesia dihadapkan pada tantangan multidimensi yang mengancam integrasi nasional, keamanan, dan pemulihan ekonomi. Lepasnya Timor Timur sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas Indonesia, namun dalam perjalanannya justru menjadi katalis bagi transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan keamanan, dan hubungan internasional.

Artikel ini menganalisis dampak lepasnya Timor Timur terhadap kestabilan Indonesia dalam kurun waktu 1999 hingga 2020, dengan menitikberatkan pada empat dimensi utama: politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, artikel ini berargumen bahwa meskipun pada awalnya menimbulkan guncangan hebat, lepasnya Timor Timur justru mempercepat proses konsolidasi demokrasi dan reformasi institusi yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya stabilitas jangka panjang. Dampak tersebut terlihat dari reformasi sektor keamanan, normalisasi hubungan internasional, serta kebijakan otonomi daerah yang lebih inklusif.

Penelitian ini penting untuk memahami dinamika pasca-konflik dan transformasi negara dalam menghadapi disintegrasi wilayah. Temuan artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana suatu peristiwa yang semula dianggap sebagai “krisis” justru dapat menjadi momentum bagi pembangunan stabilitas nasional yang lebih resilient dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang diimplementasikan melalui empat tahapan integral, dimulai dengan heuristik berupa pengumpulan sumber primer dan sekunder dari buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan, dilanjutkan dengan kritik sumber melalui verifikasi keaslian materi (kritik eksternal) dan analisis kredibilitas konten (kritik internal). Selanjutnya, dilakukan interpretasi dengan menafsirkan fakta sejarah yang terverifikasi untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dan kontekstualisasi peristiwa, serta dikonfrontasikan dengan fokus penelitian artikel. Tahap akhir adalah historiografi, dimana seluruh temuan disintesis ke dalam narasi

sistematis, objektif, dan rasional untuk menyajikan kesimpulan yang komprehensif mengenai dampak lepasnya Timor Timur terhadap stabilitas Indonesia dalam kurun waktu 1999-2020.

Hasil dan Pembahasan

Lepasnya Timor Timur yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999 merupakan suatu peristiwa multidimensional yang diakibatkan oleh interaksi kompleks dari faktor historis, politik, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan kajian akademis terhadap literatur dan sumber primer, kepergian provinsi ke-27 Indonesia ini dapat diuraikan melalui empat dimensi penyebab berikut:

Status Integrasi yang Problematic dan Tidak Diakui Secara Internasional

Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia pada tahun 1976 tidak pernah mencapai legitimasi internasional yang utuh. PBB, melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 384 dan 389, terus mengakui Portugal sebagai kekuatan administratif yang sah, sementara aneksasi oleh Indonesia dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip self-determination yang diatur dalam Piagam PBB. Status yang tidak jelas ini menciptakan resistensi internal yang berkelanjutan, dimanifestasikan melalui perjuangan bersenjata oleh Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) dan jaringan bawah tanah sipil. Pelanggaran HAM yang terjadi selama pendudukan seperti peristiwa Santa Cruz (1991) terus memicu kecaman internasional dan mengisolasi Indonesia secara diplomatik, sehingga konflik ini tidak hanya menjadi beban militer tetapi juga beban moral dan politik bagi pemerintah Indonesia.

Perubahan Dinamika Politik Global dan Tekanan Ekonomi

Pasca-Perang Dingin, isu HAM, demokrasi, dan governance menjadi central dalam hubungan internasional. Indonesia, di bawah rezim Orde Baru, semakin dilihat sebagai negara represif di mata komunitas global. Krisis moneter Asia 1997 memperparah situasi: nilai rupiah anjlok, utang luar negeri membengkak, dan Indonesia terpaksa meminta bantuan darurat dari IMF dan Bank Dunia. Lembaga-lembaga keuangan internasional ini tidak hanya mensyaratkan reformasi ekonomi, tetapi juga reformasi politik termasuk penyelesaian masalah Timor Timur. Negara-negara donor utama, seperti Amerika Serikat dan Australia, menerapkan embargo senjata dan mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi jika Indonesia tidak menyelesaikan konflik secara damai. Dengan demikian, kepentingan ekonomi nasional yang mendesak memaksa Indonesia untuk merenegosiasi posisinya terhadap Timor Timur.

Kebijakan Transformasional Presiden B.J. Habibie dalam Konteks Transisi Politik

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie memimpin suatu pemerintahan transisi yang berusaha membedakan diri dari rezim sebelumnya. Habibie percaya bahwa konflik Timor Timur telah menghambat rekonsiliasi nasional dan penerimaan internasional Indonesia. Pada Januari 1999, tanpa konsultasi menyeluruh dengan TNI atau parlemen, Habibie mengumumkan kebijakan radikal: memberikan pilihan kepada rakyat Timor Timur antara otonomi luas dalam NKRI atau kemerdekaan penuh. Kebijakan ini didorong oleh keinginan untuk membuka isolasi diplomatik dan menghentikan beban finansial yang ditimbulkan oleh wilayah konflik. Namun, kebijakan ini tidak didukung oleh persiapan memadai di lapangan dan mengabaikan kompleksitas psiko-sosial masyarakat Timor Timur, sehingga justru menciptakan vacuum of power yang rawan kekerasan.

Eskalasi Kekerasan Pasca-Referendum dan Intervensi Internasional

Referendum yang diselenggarakan oleh UNAMET pada 30 Agustus 1999 berlangsung damai dan menghasilkan 78,5% suara menolak otonomi (pro-kemerdekaan). Namun, pengumuman hasil ini memicu reaksi kekerasan sistematis dari milisi pro-integrasi yang didukung oleh elemen dalam TNI. Pembakaran, pengungsian paksa, dan pembunuhan terjadi secara masif, menciptakan krisis kemanusiaan yang menarik perhatian global. Liputan media internasional yang menyoroti kehancuran di Dili dan kota lainnya memicu tekanan moral yang massive kepada PBB dan negara-negara besar. Australia, yang awalnya mendukung integrasi, akhirnya memimpin intervensi multinasional melalui INTERFET (International Force for East Timor) yang disahkan oleh PBB. Intervensi ini tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga mentransformasi hasil referendum menjadi realitas politik: kemerdekaan penuh bagi Timor Leste.

Kemerdekaan Timor Leste bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan suatu proses historis yang digerakkan oleh ketidakabsahan integrasi awal, tekanan ekonomi-politik internasional, kebijakan domestik yang berani namun kurang persiapan, serta dinamika kekerasan pasca-referendum yang memicu intervensi global. Lepasnya wilayah ini mencerminkan kegagalan kebijakan integrasi Orde Baru dan sekaligus menjadi contoh bagaimana tekanan internasional dan keputusan domestik dapat berinteraksi dalam menentukan nasib suatu wilayah. Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri dalam hubungan internasional.

Dampak Lepasnya Timor Timur terhadap Indonesia

Peristiwa lepasnya Timor Timur (kini Timor Leste) dari Indonesia pada tahun 1999 menjadi momen penting yang membawa dampak mendalam dan multi-segi bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi kondisi politik dan keamanan, tetapi juga meninggalkan jejak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis bangsa. Berikut adalah analisis detail mengenai dampak-dampak tersebut:

Dampak Politik dan Hubungan Internasional: Transformasi Citra di Mata Global

Kritik Domestic dan Isu Disintegrasi

Lepasnya Timor Timur memicu reaksi keras di dalam negeri, terutama dari kalangan nasionalis dan militer yang menganggap keputusan ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah. Muncul kekhawatiran bahwa kemerdekaan Timor Timur dapat memicu efek domino dan mendorong daerah lain seperti Aceh dan Papua untuk memperkuat gerakan separatisnya.

Pemulihan Reputasi Internasional

Di tingkat global, penyelesaian masalah Timor Timur justru membuka peluang bagi Indonesia untuk memulihkan citranya. Dengan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi dan menghormati hasil referendum, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri. Hal ini mempermudah re-engagement dengan negara-negara Barat dan lembaga internasional, yang sebelumnya membatasi hubungan akibat pelanggaran HAM di masa lalu.

Normalisasi Hubungan dengan Australia dan Negara Lain

Hubungan dengan Australia, yang sempat merenggang akibat intervensi INTERFET, secara bertahap pulih dan berkembang menjadi kemitraan strategis, termasuk dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Dampak Militer dan Keamanan Nasional: Reformasi yang Terpacu

Perubahan Peran TNI

Peristiwa ini mempercepat proses reformasi sektor pertahanan dengan mendorong pemisahan peran militer dari politik. Kebijakan “dwifungsi” ABRI (sekarang TNI) secara resmi diakhiri, dan TNI berfokus kembali pada fungsi pertahanan eksternal.

Restrukturisasi dan Penataan Internal

Pemerintah melakukan pembersihan dan reshuffle jenderal serta perwira yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola militer yang lebih profesional dan akuntabel.

Pergeseran Strategi Keamanan

Pasca-peristiwa tersebut, Indonesia mengubah pendekatannya dengan lebih menekankan pada diplomasi dan penanganan konflik secara damai, meskipun tantangan keamanan internal masih berlanjut di beberapa daerah.

Dampak Ekonomi: Melepaskan Beban dan Membuka Peluang

Penghematan Anggaran

Selama menjadi bagian dari Indonesia, Timor Timur merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketergantungan besar pada subsidi pusat. Lepasnya wilayah ini mengurangi beban fiskal pemerintah Indonesia, yang dapat mengalihkan dana ke pembangunan daerah lain.

Pemulihan Kepercayaan Investor

Penyelesaian konflik Timor Timur dianggap sebagai langkah positif dalam mengurangi risiko politik bagi investor. Hal ini membantu memulihkan kepercayaan pasar dan menarik kembali investasi asing yang sempat menurun drastis pasca-krisis moneter 1997.

Dampak pada Pembangunan Regional

Sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk Timor Timur dialihkan ke provinsi-provinsi lain, terutama di Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Dampak Sosial-Budaya dan Psikologis: Trauma dan Refleksi

Migrasi dan Problema Kemanusiaan

Ribuan pengungsi pro-otonomi meninggalkan Timor Timur dan menetap di wilayah Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan tempat tinggal, mata pencaharian, dan integrasi bagi para pengungsi ini.

Refleksi Nasional atas Sejarah dan Identitas

Peristiwa ini memicu evaluasi mendalam mengenai kebijakan masa lalu, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi selama periode integrasi. Masyarakat Indonesia mulai lebih terbuka dalam membahas isu-isu sensitif seperti nasionalisme, otonomi daerah, dan rekonsiliasi.

Pengaruh terhadap Pendekatan Konflik Daerah

Pengalaman pahit ini mendorong pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih dialogis dan damai dalam menyelesaikan konflik di daerah lain, seperti Aceh dan Papua, yang akhirnya menghasilkan otonomi khusus untuk Aceh pada tahun 2005.

Dampak Hukum dan HAM: Upaya Akuntabilitas

Tuntutan Akuntabilitas

Tekanan internasional dan domestik mendorong pembentukan pengadilan HAM untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi selama masa integrasi dan periode referendum. Meskipun hasilnya dinilai banyak pihak belum memuaskan, langkah ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dan HAM.

Pengaruh pada Kebijakan Luar Negeri

Indonesia menjadi lebih aktif dalam menyuarakan isu-isu HAM dan perdamaian di forum internasional, sebagai bagian dari upaya membangun citra baru sebagai negara yang demokratis dan menghormati hukum internasional.

Lepasnya Timor Timur membawa dampak kompleks dan berlapis bagi Indonesia. Dalam jangka pendek, peristiwa ini menimbulkan guncangan politik, ekonomi, dan sosial. Namun, dalam jangka panjang, ia berperan sebagai katalis bagi proses reformasi demokrasi, transformasi militer, dan redefinisi hubungan internasional Indonesia. Pelajaran dari peristiwa ini turut membentuk pendekatan Indonesia yang lebih terbuka, inklusif, dan damai dalam menghadapi tantangan pembangunan dan keberagaman.

Dampak Lepasnya Timor Leste terhadap Politik dan Stabilitas Dalam Negeri Indonesia (1999–2020)

Lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999 merupakan titik balik dalam sejarah politik Indonesia yang baru saja memasuki era Reformasi. Peristiwa tersebut menandai kegagalan rezim Orde Baru dalam mempertahankan integrasi wilayah, sekaligus memperlihatkan lemahnya legitimasi pemerintah terhadap daerah yang pernah dianeksasi. Secara politik, referendum Timor Timur yang difasilitasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat tuntutan reformasi struktural, terutama dalam kaitannya dengan peran militer. TNI yang selama masa Orde Baru menguasai ruang politik melalui konsep dwi fungsi ABRI mendapat sorotan tajam, baik dari masyarakat domestik maupun internasional, karena dianggap berperan dalam kekerasan yang terjadi pasca-referendum. Situasi ini mempercepat proses reformasi sektor keamanan yang sudah dimulai sejak 1998, dengan menegaskan perlunya pemisahan peran militer dan sipil dalam tata kelola politik nasional.

Dampak lainnya terlihat pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada tahun 1999. Hilangnya Timor Leste menjadi pelajaran penting bahwa sentralisasi berlebihan berpotensi menimbulkan perlawanan di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Tujuannya adalah memberikan ruang politik dan ekonomi yang lebih besar bagi daerah agar tidak muncul gejolak separatisme. Kebijakan ini mencerminkan transformasi mendasar dalam hubungan pusat-daerah, di mana daerah diberi wewenang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan lokal. Dengan demikian, lepasnya Timor Leste berfungsi sebagai katalis bagi lahirnya era otonomi daerah di Indonesia.

Selain itu, peristiwa ini juga memberi pengaruh terhadap cara pemerintah Indonesia menangani gerakan separatisme di wilayah lain, khususnya Aceh dan Papua. Di Aceh, pengalaman pahit kehilangan Timor Leste mendorong pemerintah untuk mencari jalan damai melalui negosiasi. Hasilnya adalah Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Sementara di Papua, pemerintah berupaya mengombinasikan pendekatan keamanan dengan pembangunan, meskipun hingga 2020 masih terjadi dinamika perlawanan dari kelompok pro kemerdekaan. Secara tidak langsung, hilangnya Timor Leste menjadi “peringat” bagi elit politik Indonesia bahwa penggunaan kekuatan militer semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan separatisme, dan bahwa penyelesaian politik dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan.

Dalam konteks demokratisasi, lepasnya Timor Leste juga memperkuat dorongan untuk membangun tata kelola negara yang lebih transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Tekanan internasional akibat referendum Timor Timur membuat Indonesia berusaha memperbaiki citra di mata dunia dengan memperkuat institusi demokrasi dan membatasi dominasi militer. Sepanjang 1999–

2020, perkembangan politik Indonesia menunjukkan bahwa peristiwa Timor Leste menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi demokrasi, terutama dalam hal pemisahan peran sipil dan militer, pemberdayaan daerah melalui otonomi, dan pembelajaran dalam mengelola keragaman bangsa. Dengan demikian, lepasnya Timor Leste bukan hanya peristiwa kehilangan wilayah, melainkan juga titik awal bagi transformasi politik dalam negeri yang lebih demokratis, meskipun tantangan menjaga keutuhan dan stabilitas tetap berlangsung hingga kini.

Kesimpulan

Lepasnya Timor Timur pada tahun 1999 memang menorehkan luka politik, ekonomi, dan sosial yang cukup dalam bagi Indonesia. Namun, rentang waktu dua dekade setelahnya memperlihatkan bahwa peristiwa tersebut sekaligus menjadi titik awal transformasi besar dalam tata kelola negara. Dari sisi politik, Indonesia terdorong untuk memperkuat sistem demokrasi, membatasi dominasi militer, dan memperluas otonomi daerah guna mencegah munculnya gejala separatisme di wilayah lain. Dari sisi keamanan, peristiwa ini mempercepat reformasi TNI dengan menegaskan peran profesionalisme militer yang terpisah dari politik praktis. Dari sisi ekonomi, hilangnya Timor Timur mengurangi beban fiskal negara dan memberi ruang bagi pemulihan pasca-krisis moneter, serta meningkatkan kembali kepercayaan investor. Sementara dari sisi sosial dan HAM, pengalaman ini mendorong lahirnya kesadaran nasional akan pentingnya dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri.

Dengan demikian, peristiwa lepasnya Timor Timur tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kegagalan, melainkan juga sebagai pelajaran sejarah yang berharga. Ia memperlihatkan bagaimana krisis disintegrasi justru dapat memacu lahirnya reformasi mendasar yang menguatkan fondasi bangsa. Hingga 2020, Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk bangkit dari trauma tersebut dan menjadikan pengalaman Timor Timur sebagai pijakan dalam membangun stabilitas nasional yang lebih inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anthony L. Smith, "Indonesia's Foreign Policy after the Cold War: Resilience and Recovery," *Contemporary Southeast Asia* 22, no. 2 (2000): 237–259, <https://www.jstor.org/stable/25798505>.

- Aspinall, Edward. *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?* Washington: East-West Center, 2005.
- Clinton Fernandes, "Bearing Witness: The Impact of the 1999 East Timor Crisis on the Australian Defence Force," *Australian Journal of International Affairs* 55, no. 3 (2001): 455–470, <https://doi.org/10.1080/10357710120095207>.
- Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), *Chega! The Final Report of the Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR, 2005)*, hlm. 45-48.
- Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: ISEAS Publishing, 2010.
- Damien Kingsbury, *South-East Asia: A Political Profile* (2nd ed., Oxford University Press, 2005), hlm. 234-237.
- Edward Aspinall, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?* (East-West Center Washington, 2005), hlm. 22-25.
- Habibie, B. J. *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi* (THC Mandiri, 2006), hlm. 156-160.
- Hal Hill, *The Indonesian Economy* (2nd ed., Cambridge University Press, 2000), hlm. 278-281.
- Harold Crouch, "The TNI and East Timor Occupation," dalam *Indonesia and East Timor: The Consequences of Integration*, ed. A. Soedjati & R. Cribb (Routledge, 2003), hlm. 151-174.
- International Crisis Group, *Resolving Timor-Leste's Crisis*, Asia Report No. 120 (2006), hlm. 12-15.
- Irena Cristalis, *Bitter Dawn: East Timor, A People's Story* (Zed Books, 2002), hlm. 89-92.
- James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence* (3rd ed., Longueville Books, 2003), hlm. 45-47.
- United Nations Security Council, *Resolution 384 (1975) on the Situation in Timor*, United Nations Digital Library (1975), <https://digitallibrary.un.org/record/190100>.